

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1 Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dimaksudkan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program dalam capaian kinerja masing-masing indikator program. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian program/kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi program/kegiatan. Selain itu monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan, memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya.

1. Pemantauan (monitoring)

Pemantauan/monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Pemantauan/monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil

keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk :

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
- 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan
- 5) kegiatan;
- 6) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatanhambatan
- 7) selama kegiatan;
- 8) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- 9) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Selanjutnya prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melakukan monitoring antara lain : 1) Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus, 2) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi, 3) Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan, 4) Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi, 5) Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku, 7) Monitoring harus obyektif, 8) Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat (4) fungsi, sebagai berikut :

- 1) Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- 3) Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.¹

Dengan uraian di atas fungsi monitoring yang pokok adalah: mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati; menganalisa semua hasil pemantauan (monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan (Soewardji Lazaruth : 1994).²

Dalam kaitannya dengan capaian target MDGs, monitoring dilakukan terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Monitoring ini dapat dilakukan oleh internal SKPD maupun stakeholder yang lain.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

¹William N Dunn , (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Yogyakarta, Gajahmada University press

² Soewardi Lazaruth, (1994), *Kepala Sekolah Dan Tanggung Jawab*, Salatiga, Kanisius Yogyakarta.

Nomor Per/15/M.Pan/7/ 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan.

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.³

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dilakukan.⁴

Sedangkan menurut Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor 178/K/07/2000 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan, evaluasi kinerja proyek adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca proyek. (Bappenas, 2000). Evaluasi kinerja proyek pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan sasaran kinerja yang disepakati bersama antara pihak-pihak terkait atau dilaksanakan dengan menggunakan hasil kajian lengkap melalui suatu studi evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator dan sasaran kinerja yang telah disepakati bersama.

³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia, 2008, hal 112.

⁴Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta, hal. 14.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga atau orang di luar instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga di luar birokrasi Pemerintah Kabupaten Bintan. Evaluator eksternal ini diharapkan akan memberikan informasi atau hasil penilaian yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi ini sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/ kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan dengan berbagai tujuan dan dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan fokus evaluasi kinerja proyek atau kegiatan terdiri dari lima variabel yaitu evaluasi terhadap : masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), kemanfaatan (*benefit*) dan dampak (*impact*). Semua variabel tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Untuk evaluasi kinerja kegiatan yang sedang dilaksanakan (*on going evaluation*) tidak semua variabel tersebut digunakan. Variabel yang digunakan hanya variabel input yang di dalamnya mengandung proses.

Sedangkan untuk kegiatan yang baru saja selesai dilaksanakan di menggunakan variabel input, output, outcome dan benefit. Menurut Endang Mulyatiningsih, evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.⁵

⁵ Endang Mulyatiningsih. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta. UNY Press. Hal 114.

Beberapa pendapat ahli, mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari evaluasi, Subarsono merinci beberapa tujuan dari evaluasi sebagai berikut :

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.⁶

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pada prinsipnya digunakan untuk mengevaluasi empat (4) aspek dalam proses kebijakan publik, yaitu “1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektifitas dampak kebijakan”.

⁶ A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 120.

Berdasarkan aspek waktu melakukan evaluasi, evaluasi dapat dilaksanakan pada saat kegiatan sedang direncanakan (*pre evaluation*), Kegiatan sedang dilaksanakan (*on going evaluation*) dan kegiatan telah selesai dilaksanakan (*post evaluation*). Masing-masing jenis evaluasi ini memiliki tujuan dan instrumen yang berbeda-beda. Pre-evaluation bertujuan untuk mengetahui apakah pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan dan perencanaan kegiatan. On Going evaluation bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan. Sedangkan post evaluation bertujuan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hasil, manfaat dan dampak.

Selanjutnya Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi enam (6), sebagai berikut :

- a) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.
- b) *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan memasukkan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
- c) *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).

- d) *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e) *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- f) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana.⁷

Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya fakta pelaksanaan program/kegiatan dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif.

4.2 Indikator-Indikator Yang Dipantau Dan Dievaluasi

Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Indikator	Instansi/OPD/ Urusan
1	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT(%)	Dinas Kesehatan
2	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)	Dinas Kesehatan
3	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	Dinas Kesehatan
4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita (%)	Dinas Kesehatan
6	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium(%)	Dinas Kesehatan

⁷Patton, Sawicki, 13991, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall.

No	Indikator	Instansi/OPD/ Urusan
7	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	Dinas Kesehatan
8	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (%)	Dinas Kesehatan
9	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Kunjungan Bayi	Dinas Kesehatan
12	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
13	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 balita)	Dinas Kesehatan
14	Persentase Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan
16	Persentase penduduk usia > 18 tahun keatas yang mengalami obesitas	Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
18	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH (KK)	Dinas Sosial
19	Jumlah PMKS (PGOT, anak terlantar, Lansia terlantar dan balita terlantar) di dalam maupun di luar panti	Dinas Sosial

Pilar 2 Aksesibilitas Pangan Beragam

No	Indikator	Instansi/OPD/ Urusan
1	ketersediaan data harga kebutuhan pokok masyarakat (komoditi)	Dinas Koperasi , Usaha Mikro Keci, Perindustrian dan perdagangan
2	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/pasar rakyat (unit pasar rakyat)	Dinas Koperasi , Usaha Mikro Keci, Perindustrian dan perdagangan
3	Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi sesuai SNI (unit)	Dinas Koperasi , Usaha Mikro Keci, Perindustrian dan perdagangan
4	Jumlah industri pangan yang dibina (IKM)	Dinas Koperasi , Usaha Mikro Keci, Perindustrian dan perdagangan
5	Jumlah industri pangan yang difasilitasi promosi produk (IKM)	Dinas Koperasi , Usaha Mikro Keci, Perindustrian dan

No	Indikator	Instansi/OPD/ Urusan
		perdagangan
6	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/kg)	Dinas Ketahanan Pangan
7	Jumlah lumbung yang difasilitasi (lumbung)(kumulatif)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
8	Jumlah kelompok wanita tani desa pelaksana P2KP (KWT)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
9	Persentase penanganan daerah rawan pangan (desa)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
10	Ketersediaan pangan utama (ton)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
11	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi (kawasan) (komulatif)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
12	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa) Prog.P2KP	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
13	Konsumsi kalori mencapai 2150 kkal/kapita/hari (kkal/kap/th)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
14	Konsumsi Protein/Kap/hr(gram)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
15	Skor PPH	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
16	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
17	Skor PPH berdasarkan kelompok Pangan	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
	Padi-padian	
	Umbi-umbian	
	Pangan hewani	
	Minyak dan Lemak	
	Buah/Biji berminyak	
	Kacang-kacangan	
	Gula	
	Sayur dan buah	
	lain-lain	
18	Konsumsi kelompok pangan	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
	Beras (kg/Kp/thn)	
	Pangan hewani(Kg/Kp/thn)	
	Sayur dan buah (kg/Kp/thn)	
19	Konsumsi energi(Kkal/Kp/hari)	DinasPertanian dan
	Padi-padian	

No	Indikator	Instansi/OPD/ Urusan
	Umbi-umbian	Ketahanan Pangan
	Pangan hewani	
	Minyak dan Lemak	
	Buah/Biji berminyak	
	Kacang-kacangan	
	Gula	
	Sayur dan buah	
	lain-lain	
20	Produksi Pangan Utama :	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
	Produksi padi (ton)	
	Produksi jagung (ton)	
	Produksi kedelai (ton)	
	Produksi ubi kayu (ton)	
	Produksi ubi jalar (ton)	
21	Produksi Hortikultura :	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
	Bayam (ton)	
	Sawi (ton)	
	Kacang Panjang (ton)	
	Terong (ton)	
	Ketimun (ton)	
	Cabe Besar (ton)	
22	Produksi Daging dan Telur:	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan
	Populasi Ternak Sapi (ekor)	
	Ayam Buras (ekor)	
	Produksi Telur (butir)	
	Produksi Daging Keseluruhan (kg)	
23	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Dinas Perikanan
24	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Dinas Perikanan
25	Jumlah Kegiatan FORIKAN dalam Rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan (Kegiatan)	Dinas Perikanan
26	Jumlah Peserta Pelaksanaan GEMARIKAN (Orang)	Dinas Perikanan
27	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Dinas Perikanan
28	Persentase/ Jumlah TPPKK yang dibina untuk melaksanakan kegiatan kebun gizi/toga di Kab/kota* (lokasi)	DPMD

Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan

No	Indikator	Instansi/ SKPD/ Urusan
1	Pemenuhan target sampling produk Obat disektor publik (IFK) (%)	BBPOM/ Dinkes

No	Indikator	Instansi/ SKPD/ Urusan
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	BBPOM/ Dinkes
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (%)	BBPOM/ Dinkes
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (%)	BBPOM/ Dinkes
5	persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	BBPOM/ Dinkes

Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

No	Indikator	Instansi/ SKPD/ Urusan
1	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	Dinas Kesehatan
2	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusi (%)	Dinas Kesehatan
3	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	Dinas Kesehatan
4	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber PHBS) (%)	Dinas Kesehatan
5	Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	Dinas Kesehatan
6	Jumlah warga sekolah yang peduli terhadap budaya bersih dan sehat (sekolah)	Dinas Pendidikan
7	Persentase sekolah dasar yang melaksanakan UKS	Dinas Pendidikan
8	Persentase sekolah menengah pertama yang melaksanakan UKS	Dinas Pendidikan
9	Persentase sekolah yang memiliki kantin sehat	Dinas Pendidikan
10	Jumlah peningkatan kinerja kaum perempuan dalam penanggulangan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan (orang)	Dinas Lingkungan Hidup
11	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan pemukiman (orang)	Dinas Lingkungan Hidup
12	Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah terkait Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kec) melalui:	Dinas Kesehatan
	a. Melalui radio lokal (kali)	
	b. Melalui konten cetak (lembar)	
13	Rasio Puskesmas Terhadap 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Instansi/ SKPD/ Urusan
	(%)	
14	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk (%)	Dinas Kesehatan
15	Rasio Dokter Spesialis Per 100. 000 Penduduk (jiwa)	Dinas Kesehatan
16	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk (jiwa)	Dinas Kesehatan
17	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk (%)	Dinas Kesehatan
18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Dinas Kesehatan

Pilar 5 Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

No	Indikator	Instansi/SKPD/ Urusan
1	Jumlah petugas gizi di Kab/Kota (orang)	Dinas Kesehatan
2	Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	Dinas Kesehatan
3	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif	DP3KB
4	Presentase kelompok bina keluarga balita (BKB) aktif	DP3KB
5	Presentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	DP3KB
6	Presentase kelompok bina keluarga lansia (BKL) aktif	DP3KB
7	Jumlah Koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan(DKP) dalam mendukung pangan gizi(Rakor)	DinasPertanian dan Ketahanan Pangan

4.3 Waktu dan Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing OPD. Adapun mekanisme kerja evaluasi RAD PG adalah :

- Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi
- Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.

- c. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
- d. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

4.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pelaporan:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun berikutnya
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

2. Mekanisme Pelaporan:

- a. Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

3. Isi Laporan Laporan yang dikirimkan terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RAD PG Kabupaten Bintan, sebagai berikut:

- a. Pendahuluan:
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
- b. Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Bintan.
 - 1) Gambaran Proses Penyusunan RAD-PG (jika belum menyelesaikan dokumen RAD-PG)
 - 2) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
 - 3) Gambaran Umum Program, Kegiatan, dan Pendanaan
 - 4) Tantangan yang Dihadapi
 - 5) Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan

c. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan

- 1) Rekomendasi
- 2) Rencana Tahun Depan

d. Lampiran :

- 1) Form Monev 2.1 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja RAD PG Kabupaten Bintan
- 2) Form Monev 2.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Bintan..
- 3) Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG Kabupaten Bintan (apabila sudah tersedia cukup dilaporkan sekali)

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.1 : PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA RAD-PG TAHUN

PILAR	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja/ Keluaran	OPD	Target Tahun	Capaian Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Perbaikan Gizi Masyarakat					
II	Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam					
III	Mutu dan Keamanan Pangan					
IV	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
V	Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi					

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.2: PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN

Pilar	OPD	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pilar 1: Perbaikan					
Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas					
Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan					
Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					
Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi					

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

3. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.3: UMPAN BALIK PELAPORAN PELAKSANAAN RAD-PG

Pilar	Hasil Analisa	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
Pilar 1:Perbaikan Gizi		
Pilar 2:Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam		
Pilar 3:Mutu dan Keamanan Pangan		
Pilar 4:Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi		

4. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.4: FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	JUMLAH DANA	HASIL	TANTANGAN	KET